

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK

2023

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON MELATI NO. 12 / 2023, 64 HLM.

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHAN KEBON MELATI

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat membantu masyarakat dengan lebih baik diperlukan pelayanan publik. Sehingga perlu disusun atau dibentuk standar pelayanan pada Kantor Kelurahan Kenari sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan standar pelayanan publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib Menyusun, Menetapkan dan Menerapkan Standar Pelayanan.
- Dasar Hukum dari Penetapan Kelurahan Kebon Melati ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 29 Tahun 2007; UU Nomor No. 25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP Nomor 38 Tahun 2007 PP No. 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 96 Tahun 2018; Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997; Permen Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; Permen Agama No.19 Tahun 2018; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 713 tahun 2018; Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 76 Tahun 2011; Pergub No.94 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta No. 286 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta No.47 Tahun 2017; Pergub DKI Jakarta No.185 Tahun 2017; Keputusan Gubernur Nomor 2230 Tahun 2004; Keputusan Walikota No.121 Tahun 2020; Surat Edaran Ka. Dinas Dukcapil No. 24/SE/2019.
- Dalam Keputusan Kelurahan Kebon Melati tentang penetapan standar pelayanan pada Kantor Kelurahan Kebon Melati meliputi Standar Pelayanan Urusan Pertahanan dan Waris; Standar Pelayanan Urusan Perkawinan; Standar Pelayanan Urusan Lainnya. Standar pelayanan wajib dilaksanakan dengan mekanisme dan prosedur alur, serta evaluasi yang akan dilaksanakan sekali dalam setahun.

Catatan : - Keputusan Lurah ini mulai berlaku sesuai tanggal yang ditetapkan pada 1 Maret 2023;
- Lampiran : 59 halaman.